BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan hukum dan perubahan yang berkaitan dengan dinamika sosial dengan semua kepentingan nyata ada di belakang hukum. Berkembangnya hukum tidak dapat dihambat namun dapat dipastikan akan berkembang ke arah tertentu, tetapi pada akhirnya ia membawa perubahan setelah pertarungan dengan variasi kepentingan di balik hukum itu sendiri. Seringkali hukum hanya dipahami karena aturannya kaku dan terlalu menekankan aspek sistem hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan penguasa, di sisi lain, ada juga pemahaman hukum yang menekankan aspek legitimasi pengaturan diri. Undang-undang tidak boleh tertutup bagi faktor sosial yang memengaruhi pembangunan masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu bentuk komunitas yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu dimana mereka tinggal, berkembang dan berinteraksi dalam lingkungan tertentu. Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki dua posisi, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Karena itu, posisi manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari keberadaan manusia lain. Setiap individu dalam komunitas sosial memiliki beragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya bahwa ada konflik antara kepentingan satu individu dengan kepentingan individu lainnya. Terjadinya konflik kepentingan akan menyebabkan fenomena sosial yang menciptakan situasi yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan sosial.

Indonesia adalah negara tunggal yang memiliki sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945 disingkat UUD 1945. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi persatuan dan integritas serta semua hak dan kewajibannya. Pertumbuhan terbaik adalah pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan digital, dan lain-lain, serta berbagai undang-undang dan peraturan yang mengikuti perkembangan. Lahirnya peraturan hukum dimulai dengan aturan atau kebiasaan di masyarakat. Adanya hukum dan peraturan yang telah dirumuskan dan disusun berdasarkan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam adopsi paragraf keempat dengan kajian jadi alih-alih membentuk pemerintah yang melindungi semua rakyat dan semua kehilangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan, mendidik kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam tatanan dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan tentang keadilan sosial, kemerdekaan nasional. Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk atas persetujuan Republik Indonesia yang berdaulat atas rakyat yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan dan penduduk yang dibimbing oleh kebijaksanaan untuk mewujudkan keadilan sosial orang Indonesia.

Terdapat di dalam ketentuan Bab X Pasal 26 UUD 1945 artikel yang mengatur warga dimuat dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan dengan maksud warga negara adalah penduduk asli Indonesia dan kewarganegaraan lainnya yang disahkan sebagai warga negara oleh hukum. Ayat (2) Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia. ayat (3) Masalah yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk diatur oleh hukum.

Masyarakat adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kependudukan merupakan bentuk jumlah, struktur, usia, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, mobilitas dan kualitas, serta ketahanan dalam politik, ekonomi, urusan sosial dan budaya. Manajemen kependudukan dan pengembangan keluarga yaitu suatu upaya terencana untuk mengendalikan perkembangan keluarga sedemikian rupa sehingga pertumbuhan populasi yang seimbang dan peningkatan kualitas populasi di semua dimensi populasi tercapai. Pengembangan penduduk disebut kondisi yang terkait dengan perubahan kondisi penduduk yang mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya penduduk, maka baginya diharuskan memiliki dokumen penduduk, seperti halnya surat kependudukan yang paling terakhir yaitu akta kematian (Henry S. Siswosoediro, 2008; 83).

Pemerintah memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memberikan layanan publik yang sangat baik kepada semua penduduk, sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik mengacu pada definisi layanan publik. Layanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat disingkat sebagai (UUAK), sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”.

Kependudukan yang bentuk dan jenis layanan yang memiliki cukup banyak aplikasi seperti identitas tempat tinggal, kartu keluarga, akta nikah, akta kematian dan akta kelahiran. Kemudian, khususnya yang berkaitan dengan akta kelahiran dan akta kematian. Setiap layanan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, ini biasanya merujuk pada visi dan misi instansi terkait dalam memberikan layanan yang lebih diinginkan daripada orang-orang yang menerima layanan masyarakat (Anggraini, 2017). Layanan publik adalah hak-hak mendasar bagi warga negara, harus dihormati oleh negara, karena layanan publik merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk mensejahterakan penduduknya. Buruknya pelayanan publik yang muncul sejauh ini disebabkan oleh kurangnya contoh yang

dalam pengelolaan pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi yang ada di Indonesia masih cukup kuat mengabdikan kepada kekuasaan (*state oriented*) dibandingkan kepada publik (*public oriented*) (Samsuddin, 2016).

Terkait serangkaian kegiatan dalam hal penataan dan pengendalian, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasil untuk layanan publik dan pengembangan sektor layanan lainnya. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis untuk administrasi pemerintahan, pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu untuk mengelola informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Jadi demi memastikan lancarnya layanan kepada penduduk. Pemerintah menetapkan kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan dan sertifikat pencatatan sipil.

Sistem administrasi pencatatan sipil dikatakan sebagai sistem yang mengatur semua administrasi terkait masalah kependudukan secara umum. Dalam hal ini tiga jenis sistem administrasi, yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan manajemen informasi. Masing-masing dari tiga jenis sistem administrasi masing-masing memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda dan dapat memberikan pedoman untuk semua kegiatan dalam administrasi kependudukan, masalah yang selalu dihadapi dalam pembangunan selama tingkat kesejahteraan penduduk tidak terdistribusi secara merata, baik mengenai kuantitas yang harus diatur dan diatur dengan benar, dan

juga melibatkan kualitas yang dapat mengukur tingkat kehidupan suatu bangsa (Mulyana, 2017).

Sistem administrasi yang menangani semua masalah kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pengelolaan data pendaftaran kota, informasi kependudukan, harus menjadi tantangan dan patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai sekarang undang-undang dan peraturan yang mendukungnya masih terfragmentasi, beroperasi secara independen tanpa ada kaitannya satu sama lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disingkat PTCP3S, bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat yang merupakan hak setiap warga negara dalam arti hak untuk mendapatkan tindakan otentik dari seorang pegawai negeri. Warga jarang menyadari betapa pentingnya akta kematian bagi diri untuk mempertahankan perjalanan mereka dalam mencari kehidupan. Informasi manajemen kependudukan bernilai strategis bagi manajer pemerintah, pengembangan dan layanan untuk setiap warga negara, sehingga harus dikoordinasikan dalam pengelolaan informasi kependudukan. Banyak orang tidak

tahu bahwa memiliki dokumen kepemilikan itu penting. Dokumen kependudukan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. mulai dari akta kelahiran, e-KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian. Mengetahui bahwa alasan populasi di Indonesia sangat penting, satu cara yang valid untuk mengetahuinya adalah dengan mencatat tindakan tersebut cara yang valid untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan pencatatan akta (Shahnaz Dyah Purwanto, n.d.).

Memenuhi tuntutan masing-masing penduduk untuk mendapatkan hak penduduk dan pendaftaran kota tidak mudah, masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangat berbeda, seperti kartu keluarga, kartu identitas diri, akta nikah, akta kelahiran, akta kelahiran dan akta kematian. Di sisi lain, pemerintah pusat selalu menginginkan data populasi saat ini, benar dan akurat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah serta pemerintah pusat untuk meningkatkan dan meningkatkan proses pelayanan publik yang merupakan tugas dan fungsi utama. Agar hukum kolektif melindungi hak dan kewajiban ahli waris dan aset yang ditinggalkan oleh pencipta, pengaturan diperlukan untuk kasus kematian guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut (Mulyana, 2017).

Satu hal tidak dapat dihindari oleh setiap manusia adalah kematian, karena kematian peristiwa melampaui kendali manusia. Kematian suatu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak bisa ditolak oleh manusia karena cepat atau lambat manusia akan kembali ke pelukannya. Bagaimana bisa diketahui orang-

orang yang percaya atau percaya bahwa kematian adalah panggilan ilahi kepada umat manusia yang dibuat oleh Tuhan sebagai pencipta. Namun, karena masih terkait dengan karakteristik sekuler, sangat penting bahwa peristiwa kematian ini didaftarkan pada lembaga untuk mengambil tindakan, sehingga mereka yang masih hidup tahu siapa anggota terdekat keluarga si meniggal. Ini harus dilakukan karena sangat berguna untuk mengetahui siapa sebenarnya pewaris si meniggal dan janda yang ditinggalkannya. Status hukum janda mungkin lebih positif jika didukung oleh bukti tertulis dan otentik dalam bentuk tindakan yang dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk oleh Negara. Selain memiliki kekuatan untuk mengelola dan mengeluarkan akta kematian, karena akta kematian secara eksplisit menjelaskan pasangannya, dan keluarga yang ditinggalkan.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kependudukan di Kota Batam secara terpisah, kelompok dan lembaga yang perlu secara efektif dan efisien meningkatkan profesionalis aparatur pemerintah, yaitu kapasitas administrasi dalam bentuk tanggungjawab, etika, disiplin dan ketertiban, dalam rangka menciptakan kualitas dan kualitas layanan, Secara kelembagaan, perlu untuk memperbaiki struktur birokrasi, sistem dan proses, sumber daya, kepemimpinan dan hubungan masyarakat untuk menerapkan layanan publik yang berkualitas. Membutuhkan layanan yang semakin berkualitas, hal ini pemerintah sebagai penyedia bisa lebih memperhatikan layanan ini, karena dalam berbagai kesempatan pemerintah selalu berjanji untuk melayani masyarakat.

Saat ini, banyak kasus terkait dengan masalah manajemen populasi di berbagai daerah di Indonesia. Kontribusi ilegal, keterlambatan dalam memperoleh sertifikat komunitas dan penerbitan dokumen yang sudah ketinggalan zaman adalah beberapa kendala yang dihadapi komunitas sensus dan pemerintah. Berbagai upaya dan usaha juga telah dilakukan untuk mengatasi agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi dan di minimalisir (Rukayat, 2017).

Sebuah organisasi yang melayani sektor demografi sesuai dengan prinsip-prinsip umum Indonesia. Tujuan mendaftarkan akta kematian masih belum tercapai karena komunitas itu sendiri masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang meninggal, maka sudah berakhir, sehingga tidak perlu melaporkan dan mengurus kematian keluarganya dalam mendapatkan akta dan kemudian juga tingkat kesadaran yang rendah. pentingnya mengelola akta kematian. Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya akta kematian tidak hanya terjadi di daerah kecil di Indonesia yang belum memahami kegunaan akta kematian dan pengaruhnya terhadap dirinya sendiri atau negara, tetapi juga di kota-kota besar, salah satunya kota Batam. Pencapaian pencetakan dan penerbitan akta kematian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam implementasi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Akta kelahiran dan akta kematian menurut data yang diterima terus menurun juga meningkat/belum sikron.

Dalam hal ini, layanan yang tepat untuk manajemen populasi yang baik, inovatif dan berkualitas harus dilakukan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk digunakan sebagai dasar kepastian hukum seseorang, catatan atau catatan peristiwa penting seperti

pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan validasi anak harus dimasukkan dalam Register. hal-hal seperti di atas, dipegang oleh Pemerintah dan ditugaskan untuk merekam, merekam, dan merekam selengkap mungkin peristiwa apa pun yang relevan dengan situasi pribadi seseorang.

Semua peristiwa penting dalam keluarga yang memiliki aspek hukum harus dicatat dan diolah sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas (Syahrudin, 2016). Orang selalu menuntut layanan publik yang baik dari birokrat setiap saat, bahkan jika persyaratan ini sering tidak sesuai dengan harapan, karena pada kenyataannya layanan publik yang telah muncul sejauh ini ditandai dengan rumit, lambat, mahal dan penasar. Tren seperti itu terjadi karena komunitas masih diposisikan sebagai bagian "melayani", bukan yang dilayani. Karena itu, penting untuk mereformasi layanan publik dengan mengembalikan dan menemukan "pelayan" dan "melayani" mereka dalam pemahaman yang benar. Layanan yang ditujukan kepada masyarakat umum kadang-kadang dikonversi menjadi layanan masyarakat untuk negara, meskipun negara sebenarnya mewakili untuk kepentingan masyarakat (Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, 2015).

Koordinasi dalam proses administrasi kependudukan mempengaruhi penyediaan data yang baik, terkait administrasi ini tidak berdiri sendiri, karena terkait dengan konteks pemerintahan. Koordinasi dalam pemerintahan adalah pengaturan aktif, bukan pengaturan pasif. Ini berarti membuat aturan tentang

semua gerakan dan kegiatan dan hubungan kerja, terutama di daerah setempat di bidang administrasi kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan bertujuan untuk mencegah kebingungan dan kegiatan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan efek yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada moral dan tata kerja bagi lembaga instansi yang terkait (Sulaiman, 2018).

Setiap kelahiran, keluarga harus mengurus akta kelahiran, di mana fungsinya sangat berguna untuk masa depan anak. Demikian pula, setiap kematian yang terjadi harus dilaporkan kepada petugas RT/RW atau kelurahan, di mana akta kematian dapat dikeluarkan sebagai surat pengantar untuk penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Akta kematian adalah tindakan yang disiapkan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang secara definitif membuktikan kematian seseorang. Warga yang telah meninggal harus dilaporkan untuk didaftarkan dalam catatan sipil. Jika tidak, laporan akan tetap disimpan dalam daftar kependudukan.

Ketika orang meninggal di masa lampau, ahli waris/keluarga yang ditinggalkan dapat membuat pernyataan untuk mengajukan permohonan akta kematian yang mencakup rincian kapan dan di mana kerabat meninggal. Dalam permohonan mencakup dua orang saksi, serta pernyataan dari RT / RW dan lurah setempat. Dokumen yang diperlukan termasuk fotokopi identitas diri si meninggal, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas dua saksi. Perlu kita ketahui bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh krtua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register

Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dalam identifikasi seseorang yang hilang atau mati, tetapi yang mayatnya tidak ditemukan, pendaftaran oleh petugas pencatatan sipil hanya setelah keputusan pengadilan, dan seseorang yang identitasnya tidak jelas, pelaksana mencatat kematian berdasarkan informasi dari polisi.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mengulas penulisan skripsi ini, dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TERHADAP PENETAPAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI KOTA BATAM.**

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang tersebut diatas, identifikasi masalah yang Penulis kemukakan antara lain :

1. Dengan semakin banyaknya angka kematian yang tidak dilaporkan oleh sebagian masyarakat hal tersebut karena proses pengurusan yang sulit dan ribet.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan atau fungsi akta kematian hal itu sosialisasi yang kurang dari pihak terkait.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktifitas penyusunannya, Penulis membatasi masalah sebagaimana latar belakang yaitu:

1. Terkait analisis hukum kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian.

2. Analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, penulis merumuskan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian?
2. Bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penulisan skripsi yaitu :

1. Untuk menganalisis kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta kematian.
2. Mengetahui serta memahami bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terhadap akta

kematian terkait harta waris melalui penetapan pengadilan, dalam perspektif yuridis empiris dan hak asasi manusia. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai akta kematian terkait harta waris melalui penetapan pengadilan. Secara praktis menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia akademis terutama bagi diri Penulis serta sebagai syarat pengambilan gelar Sarjana (Soekanto, 2015).